

PRESIDEN INGATKAN SEMUA PIHAK

Pastikan Bantuan Covid-19 Tepat Sasaran

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta, dalam jangka pendek semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (Bansos) Tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, betul-betul harus dipastikan tepat sasaran dan berjalan efektif.

"Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan yang sangat membutuhkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Padat Karya Tunai yang ada di desa," kata Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa melalui konferensi video di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Kepala Negara minta agar hal ini betul-betul dikawal sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja ataupun yang berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa.

Presiden juga menegaskan lagi bahwa pandemi yang tengah dihadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstall ulang, memperbaiki lagi, dan juga

melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa.

Ditegaskan Presiden, pandemi ini menghantam bukan hanya seluruh lapisan masyarakat di perkotaan tetapi juga di pedesaan. "Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan, maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi bukan urbanisasi tetapi ruralisasi," jelas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta semua kementerian untuk mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dan program peningkatan ekonomi desa.

Selain itu Presiden mengingatkan untuk memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Setiap desa perlu mengembangkan potensi desanya, potensi lokalnya baik berkaitan dengan pertanian, wisata desa dan juga industri yang ada di desa.

Menurutnya, untuk penguatan daya ungkit ekonomi desa tersebut, tidak harus *top down*, tapi harus diberikan ruang untuk partisipasi dan kreasi warga desa untuk mengembangkan potensi lokalnya.

(Sim)-f



PENATAAN TUGU: Bahan bangunan serta alat berat tampak berada di sekitar Tugu Pal Putih Yogyakarta, Kamis (24/9). Penataan kawasan tersebut terus dikebut dengan pekerjaan utama memindahkan ke bawah tanah kabel listrik serta fiber optic yang selama ini melintang di atas dan mengganggu estetika Tugu.

KR-Surya Adi Lesmana

PERAWATAN DI RS RUJUKAN

Pasien Covid-19 Tidak Dibebani Biaya

JAKARTA (KR) - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pasien positif Covid-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan sama sekali tidak akan dibebani biaya perawatan.

"Pasien sama sekali tidak ditagih biaya karena seluruh klaim dilakukan rumah sakit rujukan kepada Dirjen Kemenkes yang akan ditubuhkan ke BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota," ujar Wiku dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9).

Wiku juga kembali menekankan kepada kalangan perkantoran, pelaku usaha dan pelaku industri agar tidak khawatir mengenai pembiayaan perawatan pekerjaannya yang positif Covid-19, karena seluruh biaya perawatan ditanggung Pemerintah baik mereka

yang ikut maupun tidak ikut BPJS Kesehatan, termasuk warga negara asing.

Dikatakan, yang perlu dilakukan kalangan perkantoran yang memiliki karyawan adalah bersikap transparan melaporkan jika ada karyawan yang positif Covid-19 ke Dinas Kesehatan setempat. Kantor selanjutnya wajib melakukan upaya pengendalian lanjutan yaitu tracing untuk bisa menjangkau kontak erat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat serta Dinas Ketenagakerjaan.

Ia mengimbau perkantoran untuk memberikan layanan uji usap

atau swab gratis bagi daftar kontak erat yang ada.

Menurut Wiku, jika ditemukan kasus positif tambahan segera merujuk karyawan positif tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan baik perawatan atau isolasi dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan karyawan yang negatif Covid-19 harus dipekerjakan di rumah.

Sementara itu jika ditemukan karyawan positif dalam jumlah banyak di kantor tersebut maka kantor tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan disinfeksi.

Kasus baru konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga pukul 12.00 WIB, Kamis, kembali mencapai angka tertinggi perharinya yaitu 4.634 kasus, sehingga total menjadi

262.022 kasus. Pasien sembuh bertambah 3.895 orang menjadi total 191.853 orang. Sementara pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 128 jiwa menjadi 10.105 kematian.

Jumlah kasus positif Covid-19 perharinya kini berada di atas 4.000 perhari pada beberapa hari terakhir. Jumlah kasus baru kemarin merupakan rekor tertinggi kasus positif paling banyak perhari di Indonesia. Sebelumnya kasus baru tertinggi terjadi Rabu (23/9) dengan kasus 4.465 kasus.

Jumlah tersebut didapatkan dari spesimen yang diperiksa sebanyak 42.564 spesimen dengan total 3.074.814 spesimen yang telah diperiksa. Selain itu Satgas Penanganan Covid-19 juga mencatat sebanyak 110.910 orang sebagai saspek Covid-19.

(Ant)-f

'GENOSE' KARYA UGM

Diharapkan Bisa Gantikan PCR

JAKARTA (KR) - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN) Bambang Brodjonegoro berharap, GeNose, alat deteksi Covid-19 melalui embusan napas karya Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat menggantikan alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) atau *swab test*.

"Yang paling penting, bagaimana GeNose ini sedekat mungkin dengan PCR sebagai *gold standard*. Bahwa ini kita ingin arahkan menjadi *gold standard* dan itu mungkin *next-nya*," ujar Bambang Brodjonegoro dalam serah terima alat GeNose dari UGM dan konsorsium kepada Kemenristek/BRIN di Jakarta, Kamis (24/9).

Hal itu dikarenakan PCR atau *swab test* membutuhkan biaya yang besar. Selain itu hasil deteksi Covid-19 dinilai membutuhkan waktu yang relatif lama. "Yang paling penting kita ingin melahirkan alat skrining Covid-19 yang murah, ya ini penting sekali, kemudian cepat ya, karena tentunya orang mengharapkan hasil seperti itu, murah cepat dan akurat," jelasnya.

GeNose bekerja secara cepat dan akurat mendeteksi *Volatile Organic Compound* (VOC) karena adanya infeksi Covid-19 yang keluar bersama napas. Napas orang diambil di indera melalui sensor-sensor dan kemudian diolah datanya dengan bantuan kecerdasan buatan untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan.

(Ati)-d

JIKA PILKADA MUNCULKAN KLASSTER BARU

PP Muhammadiyah Gugat Pemerintah

JAKARTA (KR) - Sekretaris LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali mengungkapkan, organisasi keagamaan Muhammadiyah tetap menyarankan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember ditunda, meskipun ada ketentuan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Meski begitu, sama sekali tidak bisa menjadi jaminan pilkada aman dari penyebaran virus Korona.

Hal itu diungkapkan Rohim dalam diskusi daring yang diselenggarakan Mappilu PWI dengan tema 'Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama' Kamis (24/9) malam.

Selain Abdul Rohim hadir dalam diskusi yang diikuti ratusan peserta ini Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo, Sekjen PB NU, Helmy Faishal Zaini, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto dan PKDH Otda Kemandagri, Heri Roni.

Menurut Rohim, pelaksanaan Pilkada sangat berbahaya. Sebab, pada tahap pendaftaran bakal calon 4-6 September 2020 lalu saja telah terjadi 243 pelanggaran prokes. PP Muhammadiyah khawatir prokes yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan maksimal.

"Muhammadiyah akan mengawal

pilkada serentak, tapi kami tetap berpendirian bagaimanapun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan mengugat pemerintah jika kasus Covid-19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan. "Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala-galanya kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan, tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat," ujar Rohim.

Rohim menambahkan, Pilkada Serentak ditakutkan akan menelan banyak korban mengingat Indonesia punya pengalaman meninggalnya petugas penyelenggara Pilkada 17 April 2019 lalu. Saat itu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan.

Mappilu PWI yang konsen pada pelaksanaan Pilkada yang sehat dan berbudaya ini turut khawatir, akan terjadi ledakan kasus Covid-19 di 270 daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) pada pilkada yang diperkirakan bakal melibatkan sekitar 100 juta orang ini.

Ketua Mappilu PWI, Suprpto Sastro Atmojo mengatakan, melalui diskusi ini pihaknya hendak menyerap masukan bagi KPU khususnya dalam protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

(Ati)-f

MENINGGAL 1 ORANG

4 ASN Pemda DIY Positif Covid

YOGYA (KR) - Adanya informasi tentang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan DIY (Bapel Jamkesos DIY) yang meninggal akibat Covid-19 pada Rabu (23/9) dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji. Selain 1 ASN yang meninggal juga ada 3 ASN Bapel Jamkesos DIY lainnya sedang masa perawatan dan dalam keadaan baik. Upaya tracing dilakukan, baik di kantor maupun rumah ASN yang meninggal.

"Ada 4 ASN yang dinyatakan positif Covid-19, jumlah itu sudah termasuk 1 ASN yang meninggal dunia. Saat ini semua sudah dilakukan perawatan. Karyawan disana sudah dilakukan tes dan dinyatakan sehat. Bagi yang berinteraksi langsung dengan kasus positif langsung dilakukan swab, sedangkan yang tidak berinteraksi langsung dilakukan rapid. Jadi tracing tidak hanya di kantor tapi juga keluarganya," terang Sekda DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/9).

Saat dimintai tanggapan terkait dengan diberlakukannya Working From Home (WFH) pasca adanya ASN Pemda DIY yang positif Covid-

19. Baskara Aji menyatakan, sampai saat ini Pemda DIY belum ada rencana memberlakukan. Kendati demikian bagi ASN yang karena kondisi tertentu (sakit) dan tidak memungkinkan bekerja di kantor diperbolehkan melakukan WFH. "Kalau ada kantor yang tidak memungkinkan pegawainya jaga jarak, itu memungkinkan dilakukan pengaturan jam kerja. Kalau memungkinkan jaga jarak maka seperti biasa. Pergub luwes, tergantung kepala OPD mengatur. Kalau ruangan tidak bisa dilakukan jaga jarak silakan sebagian di rumah," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DIY, drg Pembajun Setyaning Astutie MKes menjelaskan, berkaitan dengan kasus ASN di Dinkes DIY yang meninggal dunia karena positif Covid-19. Pihaknya ingin menjelaskan bahwa Tupoksi atau pekerjaan yang bersangkutan tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada pasien Covid-19. Karena yang bersangkutan bekerja di bagian administrasi, manajemen sehingga tidak memberikan pelayanan langsung yang bertemu dengan customer atau para pelanggannya.

"Memang kondisi ASN tersebut (positif Covid) berdampak terhadap kondisi teman temannya yang lain. Sampai Kamis (23/9) bisa kami sampaikan memang ada 4 orang, 3 ASN dan 1 Naban yang kemudian tertular transmisi tersebut ada 4 orang. Sampai saat ini pihaknya sudah melakukan skrining sekitar 2.958 ASN. Memang sempat ditemukan ada yang reaktif, tapi setelah di swab negatif," jelas Pembajun.

Sedangkan Kasus positif Covid-19 di DIY masih mencatatkan tambahan kasus yang masih tergolong tinggi sebanyak 22 kasus, dengan demikian total kasus terkonfirmasi menjadi 2.397 kasus. Berdasarkan hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY terdapat tambahan 18 kasus sembuh maka total kasus sembuh menjadi 1.652 kasus pada Kamis (24/9). "Kasus positif Covid-19 yang baru kali ini masih mengalami kenaikan yang masih cukup tinggi sebesar 22 kasus yang tercatat sebagai kasus 2.381 hingga kasus 2.402," kata jubar Pemda DIY untuk penanganan virus Korona Berty Murtiningsih di Yogyakarta. (Ira/Ria)-f

Harga Tembakau Harus Untungkan Petani

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah terus mendorong pabrik rokok untuk membeli tembakau dengan harga pantas dan menguntungkan sesuai kualitasnya. Sebab kalau petani rugi, tahun mendatang petani bisa jadi tidak lagi menanam tembakau, sehingga pabrik akan kesulitan mendapatkan bahan baku.

"Tahun ini kualitas tembakau tidak sebaik tahun lalu, yang penting pabrik rokok dan petani saling mengerti dan tercapai harga tembakau menguntungkan," kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdurrohman saat meninjau pembelian tembakau di sejumlah gudang tembakau perwakilan pabrik rokok di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (24/9) sore.

Abdurrohman mengemukakan, ada penurunan penjualan rokok pada triwulan lalu sebesar 10 persen. Penyebabnya antara lain pandemi Covid-19 dan menurunnya pabrik rokok karena isu kenaikan cukai. Hal tersebut

berpengaruh pada penyerapan tembakau rakyat yang sedikit melambat. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah penentu kebijakan dan juga pabrik rokok, agar penyerapan dapat dipercepat dan harga juga menguntungkan petani.

Yang terpenting, kata Abdurrohman, petani tidak mencampur tembakau. Misal tembakau Temanggung jangan dicampur dengan tembakau luar Temanggung yang justru merusak kualitas tembakau, sehingga pabrik rokok justru tidak mau membelinya.

Pimpinan Perwakilan PT Djarum di Temanggung Hugiono mengatakan, PT Djarum tetap menyerap tembakau rakyat, namun memang tidak secepat tahun lalu. Kualitas yang turun karena faktor cuaca membuat pihaknya sangat selektif dalam pembelian, agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. "Cuaca sangat mempengaruhi kualitas tembakau, tahun ini kualitas turun. Namun PT Djarum

tetap membeli tembakau," kata Hugiono sembari mengatakan harga tembakau tertinggi yang dibelinya telah mencapai Grade E dengan harga sekitar Rp 100.000 perkilogram.

Sedangkan Pimpinan Perwakilan PT Gudang Garam di Temanggung Hartanto mengatakan, pembelian tembakau sesuai kebijakan perusahaan. Harga sesuai kualitas. Karena kualitas tahun ini rendah sehingga harga juga menyesuaikan. Harga telah mencapai Rp 75.000 perkilogram dan terendah Rp 45.000 perkilogram. "Rata-rata harga Rp 50.000 sampai Rp 65.000 perkilogram. Kami ingatkan perusahaan bagaimanapun petani harus hidup, karena itu tetap membeli tembakau," katanya.

Seorang petani tembakau, Agus mengatakan, harga tembakau diharapkan tinggi dan menguntungkan petani, sebab biaya budidaya juga sudah tinggi. Jika petani merugi tahun depan kemungkinan tidak mampu menanam tembakau lagi. (Osy)-d



KR-Zaini Arrosyid

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdurrohman didampingi Bupati Temanggung Al Khadziq mengunjungi gudang tembakau pabrik rokok di Temanggung.